



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. ADITYA MUFTI ARIFFIN
2. Jabatan : WALI KOTA
3. NHK : 94206

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **22.314.308.122**

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BARITO KUALA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 194 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 10.180 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 238 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 238 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
7. Tanah Seluas 7.442 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah Seluas 123 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
9. Tanah Seluas 3.759 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
10. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
11. Tanah Seluas 436 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,



HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

12. Tanah Seluas 4.350 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

13. Tanah Seluas 823 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/218 m2 di KAB / KOTA
BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

15. Tanah Seluas 5.055 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

16. Tanah Seluas 307 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

17. Tanah Seluas 305 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000.000

19. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

20. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000

21. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000

22. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

23. Tanah Seluas 4.800 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
WARISAN Rp. 67.540.821

24. Tanah Seluas 4.350 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
WARISAN Rp. 61.208.868

25. Tanah Seluas 5.431 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
WARISAN Rp. 100.558.433

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

713.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000

2. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE 2.5G AT MINIBUS Tahun 2015,
HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

3. MOTOR, VESPA VESPA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
88.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.305.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.088.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.615.115.222
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	29.035.423.344
III. HUTANG	Rp.	2.164.809.510
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	26.870.613.834

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.